



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PAJAK DAERAH TERUTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 33 ayat (5), Pasal 40 ayat (5), Pasal 47 ayat (4), Pasal 54 ayat (2), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 110 ayat (2) huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pajak Daerah Terutang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

| PARAF HIERARKIS | |
|-----------------|--|
| WAKIL BUPATI : | |
| SEKDA : | |
| ASISTEN I : | |
| ASISTEN II : | |
| ASISTEN III : | |
| KABAN : | |
| KABID : | |

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PAJAK DAERAH
TERUTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
12. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
15. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.
16. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah Dasar Pengenaan Pajak Reklame.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak

yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
21. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
22. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
26. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
27. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

28. Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
29. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango
30. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
31. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

BAB II

BESARAN PERSENTASE DAN NILAI PEROLEHAN PAJAK TERUTANG

Bagian Kesatu

PBB-P2

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ang ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan Daerah;
- (4) NJOP untuk Objek Pajak tertentu yang ditetapkan setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Besarnya NJOP Bumi dan Bangunan ditetapkan berdasarkan Klasifikasi.
- (6) Klasifikasi NJOP Bumi Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) penentuan Besaran Persentase Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan Nilai Jual Objek Pajak hasil Penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan Objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi Nilai Jual Objek Pajak dalam satu Wilayah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Besaran Persentase Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar

- 40% (lima puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak tidak kena Pajak;
- b. untuk NJOP Rp. 1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak tidak kena Pajak; dan
 - c. untuk NJOP diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak tidak kena Pajak.
- (2) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen), sedangkan untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan 0,1% (nol koma satu persen).
- (3) Yang termasuk Lahan Produksi Pangan dan Ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yakni lahan untuk menghasilkan produksi dan konsumsi komoditas pangan pokok dan/atau ternak yang memenuhi kebutuhan masyarakat setempat seperti:
- a. lahan sawah;
 - b. lahan pertanian hortikultura;
 - c. lahan perkebunan; dan
 - d. lahan ternak dan/atau penggembalaan.

Pasal 4

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tahun berikutnya.
- (4) Ketetapan minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dibayar oleh wajib pajak atas Objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan.
- (5) Ketetapan Minimal PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

- (7) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
- laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Kedua

Pajak Reklame

Pasal 5

- Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - jenis;
 - bahan yang digunakan;
 - lokasi penempatan;
 - waktu penayangan;
 - jangka waktu penyelenggaraan;
 - jumlah; dan
 - ukuran media reklame.
- Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame dengan Nilai Sewa Reklame (NSR).
- Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan HDPP ditambahkan dengan Nilai Strategis Reklame sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat 6 adalah :

$$\text{NSR} = \text{HDPP} + \text{Nilai Strategis/NS}$$

$$\text{HDPP} = \text{Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan}$$

NS = perkalian antara faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan HDPP

- (8) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (9) Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (10) Petugas pada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (11) Penyampaian SKPD kepada Wajib Pajak dilakukan oleh petugas pada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah.

Bagian Ketiga

MBLB

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah Nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga Patokan Bahan Galian Jenis MBLB sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Untuk Pengambilan MBLB tanpa izin dikenakan tambahan 15% (Lima belas persen) dari hasil perhitungan sebagai denda sanksi Administrasi.
- (7) Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (8) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Keempat

Pajak Air Tanah

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah yaitu Nilai Perolehan Air Tanah
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara progresif dengan mengalikan volume pengambilan Air Tanah dengan nilai perolehan air tanah

- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besar Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
 - (4) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
 - (5) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT dengan tarif dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
 - (7) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB III PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

| PARAF HIERARKIS | |
|-----------------|--|
| WAKIL BUPATI : | |
| SEKDA : | |
| ASISTEN I : | |
| ASISTEN II : | |
| ASISTEN III : | |
| KABAN : | |
| KABID : | |

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 27 Juni 2024
BUPATI BONE BOLANGO,

MERLAN S. ULOLI

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 27 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Juni 2024
TENTANG : PENETAPAN BESARAN PAJAK DAERAH TERUTANG

A. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN KABUPATEN BONE BOLANGO

| Kelas | Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²) | Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m ²) |
|-------|--|--|
| 001 | > 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00 | 68.545.000,00 |
| 002 | > 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00 | 66.255.000,00 |
| 003 | > 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00 | 64.000.000,00 |
| 004 | > 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00 | 61.795.000,00 |
| 005 | > 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00 | 59.625.000,00 |
| 006 | > 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00 | 57.495.000,00 |
| 007 | > 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00 | 55.405.000,00 |
| 008 | > 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00 | 53.355.000,00 |
| 009 | > 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00 | 51.345.000,00 |
| 010 | > 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00 | 49.375.000,00 |
| 011 | > 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00 | 47.445.000,00 |
| 012 | > 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00 | 45.555.000,00 |
| 013 | > 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00 | 43.705.000,00 |
| 014 | > 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00 | 41.895.000,00 |
| 015 | > 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00 | 40.125.000,00 |
| 016 | > 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00 | 38.395.000,00 |
| 017 | > 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00 | 36.705.000,00 |
| 018 | > 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00 | 35.055.000,00 |
| 019 | > 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00 | 33.445.000,00 |
| 020 | > 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00 | 31.875.000,00 |
| 021 | > 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00 | 30.345.000,00 |
| 022 | > 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00 | 28.855.000,00 |
| 023 | > 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00 | 27.405.000,00 |
| 024 | > 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00 | 25.995.000,00 |
| 025 | > 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00 | 24.625.000,00 |
| 026 | > 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00 | 23.295.000,00 |
| 027 | > 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00 | 22.005.000,00 |
| 028 | > 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00 | 20.755.000,00 |
| 029 | > 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00 | 19.545.000,00 |
| 030 | > 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00 | 18.375.000,00 |
| 031 | > 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00 | 17.245.000,00 |
| 032 | > 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00 | 16.155.000,00 |
| 033 | > 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00 | 15.105.000,00 |
| 034 | > 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00 | 14.095.000,00 |
| 035 | > 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00 | 13.125.000,00 |
| 036 | > 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00 | 12.195.000,00 |
| 037 | > 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00 | 11.305.000,00 |
| 038 | > 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00 | 10.455.000,00 |
| 039 | > 9.250.000,00 s/d 10.040.000,00 | 9.645.000,00 |
| 040 | > 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00 | 8.875.000,00 |
| 041 | > 7.790.000,00 s/d 8.500.000,00 | 8.145.000,00 |

| | | |
|-----|---------------------------------|--------------|
| 042 | > 7.120.000,00 s/d 7.790.000,00 | 7.455.000,00 |
| 043 | > 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00 | 6.805.000,00 |
| 044 | > 5.900.000,00 s/d 6.490.000,00 | 6.195.000,00 |
| 045 | > 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00 | 5.625.000,00 |
| 046 | > 4.840.000,00 s/d 5.350.000,00 | 5.095.000,00 |
| 047 | > 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00 | 4.605.000,00 |
| 048 | > 3.940.000,00 s/d 4.370.000,00 | 4.155.000,00 |
| 049 | > 3.550.000,00 s/d 3.940.000,00 | 3.745.000,00 |
| 050 | > 3.200.000,00 s/d 3.550.000,00 | 3.375.000,00 |
| 051 | > 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00 | 3.100.000,00 |
| 052 | > 2.850.000,00 s/d 3.000.000,00 | 2.925.000,00 |
| 053 | > 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00 | 2.779.000,00 |
| 054 | > 2.573.000,00 s/d 2.708.000,00 | 2.640.000,00 |
| 055 | > 2.444.000,00 s/d 2.573.000,00 | 2.508.000,00 |
| 056 | > 2.261.000,00 s/d 2.444.000,00 | 2.352.000,00 |
| 057 | > 2.091.000,00 s/d 2.261.000,00 | 2.176.000,00 |
| 058 | > 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00 | 2.013.000,00 |
| 059 | > 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00 | 1.862.000,00 |
| 060 | > 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00 | 1.722.000,00 |
| 061 | > 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00 | 1.573.000,00 |
| 062 | > 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00 | 1.416.000,00 |
| 063 | > 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00 | 1.274.000,00 |
| 064 | > 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00 | 1.147.000,00 |
| 065 | > 977.000,00 s/d 1.086.000,00 | 1.032.000,00 |
| 066 | > 855.000,00 s/d 977.000,00 | 916.000,00 |
| 067 | > 748.000,00 s/d 855.000,00 | 802.000,00 |
| 068 | > 655.000,00 s/d 748.000,00 | 702.000,00 |
| 069 | > 573.000,00 s/d 655.000,00 | 614.000,00 |
| 070 | > 501.000,00 s/d 573.000,00 | 537.000,00 |
| 071 | > 426.000,00 s/d 501.000,00 | 464.000,00 |
| 072 | > 362.000,00 s/d 426.000,00 | 394.000,00 |
| 073 | > 308.000,00 s/d 362.000,00 | 335.000,00 |
| 074 | > 262.000,00 s/d 308.000,00 | 285.000,00 |
| 075 | > 223.000,00 s/d 262.000,00 | 243.000,00 |
| 076 | > 178.000,00 s/d 223.000,00 | 200.000,00 |
| 077 | > 142.000,00 s/d 178.000,00 | 160.000,00 |
| 078 | > 114.000,00 s/d 142.000,00 | 128.000,00 |
| 079 | > 91.000,00 s/d 114.000,00 | 103.000,00 |
| 080 | > 73.000,00 s/d 91.000,00 | 82.000,00 |
| 081 | > 55.000,00 s/d 73.000,00 | 64.000,00 |
| 082 | > 41.000,00 s/d 55.000,00 | 48.000,00 |
| 083 | > 31.000,00 s/d 41.000,00 | 36.000,00 |
| 084 | > 23.000,00 s/d 31.000,00 | 27.000,00 |
| 085 | > 17.000,00 s/d 23.000,00 | 20.000,00 |
| 086 | > 12.000,00 s/d 17.000,00 | 14.000,00 |
| 087 | > 8.400,00 s/d 12.000,00 | 10.000,00 |
| 088 | > 5.900,00 s/d 8.400,00 | 7.150,00 |
| 089 | > 4.100,00 s/d 5.900,00 | 5.000,00 |
| 090 | > 2.900,00 s/d 4.100,00 | 4.100,00 |
| 091 | > 2.000,00 s/d 2.900,00 | 2.450,00 |
| 092 | > 1.400,00 s/d 2.000,00 | 1.700,00 |

| | | |
|-----|-------------------------|----------|
| 093 | > 1.050,00 s/d 1.400,00 | 1.200,00 |
| 094 | > 760,00 s/d 1.050,00 | 910,00 |
| 095 | > 550,00 s/d 760,00 | 660,00 |
| 096 | > 410,00 s/d 550,00 | 480,00 |
| 097 | > 310,00 s/d 410,00 | 350,00 |
| 098 | > 240,00 s/d 310,00 | 270,00 |
| 099 | > 170,00 s/d 240,00 | 200,00 |
| 100 | ≤ 170,00 | 140,00 |

B. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN KABUPATEN BONE BOLANGO

| Kelas | Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m ²) | Nilai Kual Objek Pajak Bangunan (Rp/m ²) |
|-------|--|--|
| 001 | > 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00 | 15.250.000,00 |
| 002 | > 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00 | 14.150.000,00 |
| 003 | > 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00 | 13.075.000,00 |
| 004 | > 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00 | 12.050.000,00 |
| 005 | > 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00 | 11.075.000,00 |
| 006 | > 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00 | 10.150.000,00 |
| 007 | > 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00 | 9.275.000,00 |
| 008 | > 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00 | 8.450.000,00 |
| 009 | > 7.300.000,00 s/d 8.050.000,00 | 7.675.000,00 |
| 010 | > 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00 | 6.950.000,00 |
| 011 | > 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00 | 6.225.000,00 |
| 012 | > 5.130.000,00 s/d 5.850.000,00 | 5.500.000,00 |
| 013 | > 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00 | 4.825.000,00 |
| 014 | > 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00 | 4.200.000,00 |
| 015 | > 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00 | 3.625.000,00 |
| 016 | > 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00 | 3.100.000,00 |
| 017 | > 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00 | 2.625.000,00 |
| 018 | > 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00 | 2.200.000,00 |
| 019 | > 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00 | 1.833.000,00 |
| 020 | > 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00 | 1.516.000,00 |
| 021 | > 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00 | 1.200.000,00 |
| 022 | > 902.000,00 s/d 1.034.000,00 | 968.000,00 |
| 023 | > 744.000,00 s/d 902.000,00 | 823.000,00 |
| 024 | > 656.000,00 s/d 744.000,00 | 700.000,00 |
| 025 | > 534.000,00 s/d 656.000,00 | 595.000,00 |
| 026 | > 476.000,00 s/d 534.000,00 | 505.000,00 |
| 027 | > 382.000,00 s/d 476.000,00 | 429.000,00 |
| 028 | > 348.000,00 s/d 382.000,00 | 365.000,00 |
| 029 | > 272.000,00 s/d 348.000,00 | 310.000,00 |
| 030 | > 256.000,00 s/d 272.000,00 | 264.000,00 |
| 031 | > 194.000,00 s/d 256.000,00 | 225.000,00 |
| 032 | > 188.000,00 s/d 194.000,00 | 191.000,00 |
| 033 | > 136.000,00 s/d 188.000,00 | 162.000,00 |
| 034 | > 128.000,00 s/d 136.000,00 | 132.000,00 |

| | | |
|-----|-----------------------------|------------|
| 035 | > 104.000,00 s/d 128.000,00 | 116.000,00 |
| 036 | > 92.000,00 s/d 104.000,00 | 98.000,00 |
| 037 | > 74.000,00 s/d 92.000,00 | 83.000,00 |
| 038 | > 68.000,00 s/d 74.000,00 | 71.000,00 |
| 039 | > 52.000,00 s/d 68.000,00 | 60.000,00 |
| 040 | ≤ 52.000,00 | 50.000,00 |

| PARAF HIERARKIS | |
|-----------------|--|
| WAKIL BUPATI : | |
| SEKDA : | |
| ASISTEN I : | |
| ASISTEN II : | |
| ASISTEN III : | |
| KABAN : | |
| KABID : | |

BUPATI BONE BOLANGO

MERLANUOLI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Juni 2024
TENTANG : PENETAPAN BESARAN PAJAK DAERAH TERUTANG

NILAI JUAL OBYEK PAJAK REKLAME

Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut:

| NO | JENIS REKLAME | BAHAN/KOMPONEN | NILAI JUAL (Rp) | KETERANGAN |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. | Reklame Papan | Kayu dan sejenisnya | 400.000 | ditempel, digantung / tahun/m2 |
| 2. | Reklame Billboard: | | | |
| | a. Billboard ukuran 0.25 M – 1 M | Besi/Logam dan sejenisnya | 350.000 | ditempel, digantung / tahun/m2 |
| | b. Billboard ukuran 1M - 3M | Besi/Logam dan sejenisnya | 400.000 | ditempel, digantung / tahun/m2 |
| | c. Billboard ukuran 3M – 5 M | Elektronik/Logam dan sejenisnya | 450.000 | ditempel, digantung / tahun/m2 |
| | d. Billboard Ukuran lebih dari 5 M | Elektronik/Logam dan sejenisnya | 500.000 | ditempel, digantung / tahun/m2 |
| 3. | Reklame Billboard bersinar | Elektronik/Logam dan sejenisnya | 500.000 | ditempel, digantung / tahun/m2 |
| 4. | Reklame Billboard sejenisnya: | | | |
| | a. Tim Plat | Logam, Plastik, Seng dan sejenis | 250.000 | ditempel, digantung / tahun/m2 |
| | b. Shop Sign | Kertas, Plastik dan sejenisnya | 350.000 | ditempel, digantung / tahun/m2 |
| | c. Shop Panting | Kertas, Plastik dan sejenisnya | 200.000 | ditempel, digantung / tahun/m2 |
| | d. Sun Screen | Kertas, Plastik dan sejenisnya | 200.000 | ditempel, digantung / tahun/m2 |
| 5. | Reklame Videotron | | 30.000 | Per 30 detik |
| 6. | Reklame Videotron (Bangunan Swasta) | | 40.000.000 | Per Tahun |
| 7. | Reklame Megatron | | 500.000 | Per M ² |
| 8. | Reklame Kain: | | | |
| | a. Spanduk | | 150.000 | Per Lembar |
| | b. Umbul-umbul | | 150.000 | Per Lembar |
| | c. Banner | | 150.000 | Per Lembar |
| | d. Baliho | | 150.000 | Per Lembar |
| 9. | Reklame Tempel, Stiker | | | |
| | Reklame Selebaran: | | | |
| | a. Selebaran | | 5.000 | Per Lembar |
| | b. Poster | | 5.000 | Per Lembar |
| 10. | Reklame Kendaraan | | 200.000 | Per M ² |
| 11. | Reklame Udara (Balon) | | 300.000 | Per Unit (sekali atraksi) |
| 12. | Reklame Apung | | 200.000 | Per M ² |
| 13. | Reklame Slide | | 400.000 | Per Kegiatan |
| 14. | Reklame Peragaan | | 500.000 | Per Kegiatan |
| 15. | Reklame Suara | | 600.000 | Per Kegiatan |

| PARAF HIERARKIS | |
|-----------------|--|
| WAKIL BUPATI : | |
| SEKDA : | |
| ASISTEN I : | |
| ASISTEN II : | |
| ASISTEN III : | |
| KABAN : | |
| KABID : | |

BUPATI BONE BOLANGO,

MERIAN ULOLI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 19TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Juni 2024
TENTANG : PENETAPAN BESARAN PAJAK DAERAH TERUTANG

BOBOT DAN SCORE MASING-MASING FAKTOR
NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME

| NO | LOKASI PEMASANGAN | | LUAS REKLAME | | SUDUT PANDANG | | KELAS JALAN | |
|----|--------------------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|
| | BOBOT 25% | SCORE | BOBOT 40% | SCORE | BOBOT 20% | SCORE | BOBOT 15% | SCORE |
| | TEMPAT PERBELANJAAN UMUM | 18 | 0,50 M2 ke bawah | 10 | 1 | 5 | I | 20 |
| | | | 0,51 - 1 m2 | 12 | 2 | 10 | II | 15 |
| | | | 1,01 - 3 m2 | 14 | 3 | 15 | III | 10 |
| | | | 3,01 - 5 m2 | 16 | 4 | 20 | IV | 5 |
| | | | 5,01 - 10 m2 | 18 | | | | |
| | | | 10 m2 ke atas | 20 | | | | |
| | TEMPAT KERAMAIAN UMUM | 15 | 0,50 M2 ke bawah | 8 | | | | |
| | | | 0,51 - 1 m2 | 10 | | | | |
| | | | 1,01 - 3 m2 | 12 | | | | |
| | | | 3,01 - 5 m2 | 14 | | | | |
| | | | 5,01 - 10 m2 | 16 | | | | |
| | | | 10 m2 ke atas | 18 | | | | |
| | JALAN UMUM | 12 | 0,50 M2 ke bawah | 6 | | | | |
| | | | 0,51 - 1 m2 | 8 | | | | |
| | | | 1,01 - 3 m2 | 10 | | | | |
| | | | 3,01 - 5 m2 | 12 | | | | |
| | | | 5,01 - 10 m2 | 14 | | | | |
| | | | 10 m2 ke atas | 16 | | | | |
| | TEMPAT USAHA | 3 | 0,50 M2 ke bawah | 1 | | | | |
| | | | 0,51 - 1 m2 | 2 | | | | |
| | | | 1,01 - 3 m2 | 4 | | | | |
| | | | 3,01 - 5 m2 | 5 | | | | |
| | | | 5,01 - 10 m2 | 8 | | | | |
| | | | 10 m2 ke atas | 10 | | | | |

PENJELASAN:

SUDUT PANDANG

- : 1. SUDUT PANDANG 1 ARAH
- 2. SUDUT PANDANG 2 ARAH
- 3. SUDUT PANDANG 3 ARAH
- 4. SUDUT PANDANG LEBIH ATAU SAMA DENGAN 4 ARAH

KELAS JALAN

- : 1. JALAN PROVINSI
- 2. JALAN KABUPATEN
- 3. JALAN DESA
- 4. JALAN LINGKUNGAN

| | |
|-----------------|---|
| PARAF HIERARKIS | |
| WAKIL BUPATI | : |
| SEKDA | : |
| ASISTEN I | : |
| ASISTEN II | : |
| ASISTEN III | : |
| KABAN | : |
| KABID | : |

BUPATI BONE BOLANGO,







MERLIM ULOLI

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Juni 2024
TENTANG : PENETAPAN BESARAN PAJAK DAERAH TERUTANG

HARGA PATOKAN JENIS MBLB

| NO | JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | HARGA STANDAR per M ³ (Rp) | KETERANGAN |
|-----|--|--|------------|
| 1. | Asbes | 35.625,- | |
| 2. | Batu Tulis | 11.250,- | |
| 3. | Batu Setengah Permata | Mengikuti Harga Pasar | |
| 4. | Batu Kapur, Batu Kali | 43.750,- | |
| 5. | Batu Apung | 20.625,- | |
| 6. | Bentonit | 12.188,- | |
| 7. | Dolomit | 37.500,- | |
| 8. | Feldspar | 8.125,- | |
| 9. | Batu Permata | Mengikuti Harga Pasar | |
| 10. | Batu Garam | 26.250,- | |
| 11. | Grafit | 31.250,- | |
| 12. | Granit, Andesit, Basal | | |
| | a. Bubuk/Batu Pecah (Split) Bahan Bangunan | 31.250,- 52.500,- | |
| | b. Balok | | |
| 13. | Gips | 26.250,- | |
| 14. | Kalsit | 21.250,- | |
| 15. | Kaolin | 30.000,- | |
| 16. | Leosit | 33.125,- | |
| 17. | Magnesit | 33.125,- | |
| 18. | Mika | 33.125,- | |
| 19. | Marmer | 38,750,- | |
| 20. | Nitrat | 30.000,- | |
| 21. | Obsidian | 10.500,- | |
| 22. | Oker | 24.000,- | |
| 23. | Pasir : | | |
| | a. Untuk Bahan Bangunan | 28.125,- | |
| 24. | b. Untuk Urug | 16.250,- | |

| | | | |
|-----|---|----------|--|
| 25. | Pasir Kuarsa | 25.000,- | |
| 26. | Kerikil / Sirtu | 31.250,- | |
| 27. | Perlit | 15.000,- | |
| 28. | Phospat | 30.000,- | |
| 29. | Tanah Urug | 18.750,- | |
| 30. | Talk | 33.125,- | |
| 31. | Tanah Diatome | 25.313,- | |
| | Tanah Liat: | 25.000,- | |
| | a. Tanah Liat Tahan Api | | |
| | b. Tanah Liat (Clay Ball) | 25.000,- | |
| | c. Tanah Liat untuk Bahan Bangunan/Batu Bata, Genteng | 25.000,- | |
| 32. | d. Tanah Liat Urug | 12.500,- | |
| 33. | Tawas | 25.625,- | |
| 34. | Tras | 12.500,- | |
| 35. | Yarosit | 10.000,- | |
| 36. | Zeolit | 10.000,- | |
| | Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 50.000,- | |

| | |
|-----------------|---|
| PARAF HIERARKIS | |
| WAKIL BUPATI : | |
| SEKDA : |  |
| ASISTEN I : |  |
| ASISTEN II : |  |
| ASISTEN III : |  |
| KABAN : |  |
| KABID : |  |

BUPATI BONE BOLANGO,



MERLAN ULOLI

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Juni 2024
TENTANG : PENETAPAN BESARAN PAJAK DAERAH TERUTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SETIAP M³ (Rp/M³ PER BULAN)

1. KUALITAS AIR : BAIK, SUMBER AIR ALTERNATIF (PDAM) ADA

| No | Peruntukan | Volume dan Harga Dasar Air per M ³ | | | | |
|----|----------------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | 0-100 (M ³) | 101-500 (M ³) | 501-1000 (M ³) | 1001-2500 (M ³) | > 2500 (M ³) |
| 1 | Non Niaga | 0 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 |
| 2 | Niaga Kecil | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 |
| 3 | Industri Kecil | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 |
| 4 | Niaga besar | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 |
| 5 | Industri Besar | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 |

2. KUALITAS AIR : BAIK, SUMBER AIR ALTERNATIF (PDAM) TIDAK ADA

| No | Peruntukan | Volume dan Harga Dasar Air per M ³ | | | | |
|----|----------------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | 0-100 (M ³) | 101-500 (M ³) | 501-1000 (M ³) | 1001-2500 (M ³) | > 2500 (M ³) |
| 1 | Non Niaga | 0 | 475 | 500 | 525 | 550 |
| 2 | Niaga Kecil | 550 | 575 | 600 | 625 | 620 |
| 3 | Industri Kecil | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 |
| 4 | Niaga besar | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 |
| 5 | Industri Besar | 750 | 800 | 850 | 875 | 900 |

3. KUALITAS AIR : JELEK

| No | Peruntukan | Volume dan Harga Dasar Air per M ³ | | | | |
|----|----------------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | 0-100 (M ³) | 101-500 (M ³) | 501-1000 (M ³) | 1001-2500 (M ³) | > 2500 (M ³) |
| 1 | Non Niaga | 0 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| 2 | Niaga Kecil | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| 3 | Industri Kecil | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 |
| 4 | Niaga besar | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 5 | Industri Besar | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |

PENJELASAN:

- NON NIAGA : 1. RUMAH TANGGA
2. ASRAMA
3. RUMAH SAKIT
4. KANTOR PEMERINTAH
5. DAN LAIN-LAIN
- NIAGA KECIL : 1. PERTOKOAN
2. RUMAH MAKAN
3. KOLAM RENANG
4. PENCUCIAN MOBIL
5. AIR ISI ULANG
- NIAGA BESAR : PERHOTELAN
- INDUSTRI KECIL : 1. HOME INDUSTRI
2. PABRIK ES
3. DAN LAIN-LAIN

INDUSTRI BESAR

- : 1. PABRIK GULA
2. PABRIK NATA DE COCO
3. PABRIK TEPUNG KELAPA/JAGUNG
4. PERUSAHAAN AIR MINUM
5. PENGGILINGAN BATU
6. PABRIK AMDK

| PARAF HIERARKIS | |
|-----------------|----|
| WAKIL BUPATI : | . |
| SEKDA : | 3 |
| ASISTEN I : | 15 |
| ASISTEN II : | 15 |
| ASISTEN III : | 15 |
| KABAN : | 15 |
| KABID : | 2 |

BUPATI BONE BOLANGO,

MERLAN ULOLI



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2024

Suwawa, Juni 2024

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PAJAK
DAERAH TERUTANG
PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM

RAMLAN ADAM, SH
NIP. 19680516 200501 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Prof DR. BJ. Habibie No 1 Kecamatan Suwawa KP 96184

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala BKPD Kabupaten Bone Bolango
Hari/Tanggal : Selasa, 21 Mei 2024
Nomor : B-900/BKPD-BB/152.b /V/2024
Perihal : **Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penetapan Besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terutang.**

- I. Dasar : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- II. Pertimbangan : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 33 ayat (5), Pasal 40 ayat (5), Pasal 47 ayat (4), Pasal 54 ayat (2), Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (2) huruf b, maka diperlukan suatu instrumen kebijakan di bidang perpajakan;
2. bahwa penerbitan Peraturan Bupati terkait Penetapan Besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terutang merupakan kewenangan dan kebijakan dari Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone Bolango.
- III. Saran : Berdasarkan pertimbangan di atas, kami mohon Ibu Bupati Bone Bolango dapat **mempertimbangan Penerbitan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penetapan Besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terutang**, dan memohon petunjuk dalam pelaksanaannya.

Demikian Telaahan Staf ini kami sampaikan. Atas pertimbangan dan persetujuan Ibu Bupati kami ucapkan terima kasih.

Modis Kurnia Kelantana

21 Mei 2024

KEPALA BADAN,

Dr. IWAN MUSTAPA SE, M.Si, MA
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19710407 199803 1 010